

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Latief. 2005. *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) Pada Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- Andi Hamzah. 2000. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Maria Farida Indrati Soeprapto. 2007. *Ilmu Perundang-undangan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Tim Penyusun. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-Empat*. Jakarta: Depdiknas.
- Tim Penyusun. 2009. *Buku Panduan Fakultas Hukum Universitas Jambi Tahun Akademis 2009/2010*. Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sukanto Satoto. 2004. *Pengaturan dan Fungsi Badan Kepegawaian Negara*. Jogjakarta: Hanggar Kreator.

B. Artikel/Jurnal

- Ahmad Yani, "Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktek Konstitusi Undang-Undang 1945", *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 15 No.2 (Juli 2018).
- Aryo Putranto, "Kantor staf presiden Bentukan Jokowi Dianggap Pemborosan", CNN Indonesia, Kamis 17 Juli 2018.
- Asip Suyadi, "Pembentukan dan Kewenangan Kantor staf presiden (KSP) Dalam Struktur Lembaga Kepresidenan Republik Indonesia, *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Vol. 10 Nomor 2 Oktober 2018.
- Ayu Utami Saraswati, "Strategi *Public Relations* Kantor Staf Presiden Republik

Indonesia Dalam Mengelola Isu Keagamaan Di Media Massa”, Skripsi Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Ilmu Dakwafi dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 1438 H/2017 M.

Ni Luh Putri Santika, “Sengketa Kewenangan Antara Kantor Staf Presiden Dengan Wakil Presiden Dan Kementerian Koordinator Negara”, Jurnal Magister Hukum Udayana E-ISSN 2502-3101 Jurnal P-ISSN 2302-528X (*Udayana Master Law Journal*) September 2016 <http://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu> Vol. 5, No. 3 : 591 – 604.

Rahayu Prasetyaningsih, “Menakar Kekuasaan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Menurut Undang-Undang Dasar 1945”, *PADJAJARAAN Jurnal ilmu hukum* Volume 4 Nomor 2 Tahun 2017 (t.t.)

C. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

_____*Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang Kantor staf presiden.* Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 34.

_____*Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.*

_____*Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*

D. Website

Ahmad Redi, "Saatnya Kantor Staf Presiden Dibubarkan", diakses melalui <https://news.detik.com/colom/d-3004508/saatnya-kantor-staf-presiden-dibubarkan/> , diakses pada tanggal 12 Maret 2023.

<https://www.indonesia.go.id/profil/sistem-pemerintahan> , diakses pada tanggal 12 April 2022.

<http://ksp.go.id/tentang-kantor-staf-presiden/> , diakses pada tanggal 10 April 2022 pukul 21.00 WIB.

Tika Primandani, “Hasil Evaluasi: Fungsi Kantor Staf Jokowi Tidak Jelas”, diakses melalui <https://nasional.tempo.co/read/716594/hasil-evaluasi-fungsi-kantor-staf-jokowi-tidak-jelas/> , diakses pada tanggal 12 Januari 2023.